

Wali Kota Kupang Resmi Terima Grand Design Kependudukan 2025–2045, Siap Jadikan Blueprint Pembangunan Berkelanjutan

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, secara resmi menerima Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tahun 2025–2045 Kota Kupang dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (26/2).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tim Penulis/Penyusun sebagai rujukan strategis pembangunan kependudukan jangka panjang.

Ketua Tim Penyusun, Drs. Andreas Asan, MM, bersama anggota tim yakni Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S., Marianus Mau Kuru, SE., M.PH., Natalia Adel H. N. Mari, S.Pd., M.Pd., serta Agustinus Hale Manek, S.Pd., M.Pd., hadir dalam kegiatan tersebut.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kupang, drg. Francisca Johana H. Ikasasi.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja akademis dan kolaboratif tim penyusun dalam merampungkan dokumen strategis tersebut.

Ia menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang

tidak bisa ditangani secara parsial.

Menurutnya, tantangan seperti stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses layanan dasar harus ditangani secara terintegrasi lintas sektor.

Ia menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Semua kebijakan berawal dari data. Jika datanya keliru, maka arah intervensi juga akan meleset. Ketika data keluarga tidak mampu sudah valid, maka seluruh OPD dapat bergerak bersama melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mendorong agar kebijakan tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan dibangun dari bawah (bottom-up), berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta diperkuat oleh kajian ilmiah yang komprehensif.

Dokumen GDPK ini memuat peta jalan lima pilar pembangunan kependudukan yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional.

Dengan integrasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang menjadikan Grand Design tersebut sebagai blueprint utama dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta seluruh program memiliki benang merah yang jelas.

Menutup kegiatan, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan kalangan akademisi dan para ahli dalam proses perumusan kebijakan daerah.

“Kita membutuhkan kolaborasi dan gagasan yang kuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Grand Design ini harus menjadi panduan bersama untuk membawa Kota Kupang tumbuh lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, tim penyusun berharap dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Kupang. (MI)

Wali Kota Kupang Ajak Warga Dukung Produk Lokal Lewat Galeri Dekranasda

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mencintai produk kerajinan lokal dengan mengunjungi Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang. Ajakan tersebut disampaikan pada Jumat (27/2/2016).

Menurut Wali Kota, Galeri Dekranasda bukan sekadar gedung pameran, melainkan rumah besar bagi kreativitas warga Kota Kupang.

Di tempat ini, karya tangan para pengrajin lokal mendapatkan ruang untuk dipromosikan, diapresiasi, dan dipasarkan secara lebih luas.

“Galeri ini adalah rumah kreativitas. Di sini, karya tangan-tangan terampil warga Kota Kupang menemukan tempat untuk

dihargai,” ujar Christian Widodo.

Ia menjelaskan, galeri kini telah mengalami banyak perubahan. Ruangan didesain lebih menarik, dilengkapi fasilitas pendingin udara (full AC), serta penataan produk yang semakin lengkap dan tertata rapi. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menghadirkan suasana belanja yang nyaman dan berkesan bagi para pengunjung.

Selain menyediakan berbagai produk kerajinan unggulan seperti tenun, kriya, dan aksesoris khas daerah, galeri juga menghadirkan fasilitas studio foto serta penyewaan busana adat.

Masyarakat dapat berfoto menggunakan pakaian adat lengkap dengan harga terjangkau, sebagai bentuk promosi sekaligus pelestarian budaya lokal.

Wali Kota menegaskan, setiap produk yang dipajang di galeri bukan hanya sekadar barang dagangan, melainkan representasi cerita, identitas, dan kerja keras para pengrajin di baliknya.

“Kita tidak hanya melihat produk, tetapi melihat cerita dan identitas di dalamnya. Setiap pembelian bukan hanya transaksi, melainkan dukungan nyata bagi ekonomi keluarga-keluarga di kota ini,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat semakin bangga menggunakan dan membeli produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif daerah.

“Kupang harus maju dengan kekuatan karyanya sendiri, dan kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan itu,” pungkasnya. (MI)

Lasiana dan Oesapa Diusulkan Jadi Kawasan Prioritas, Kupang Siap Wujudkan Kampung Nelayan Merah Putih

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara langsung mengusulkan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa agar ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam pertemuan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kedua lokasi telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis. Status lahan dinyatakan clean and clear serta telah diverifikasi oleh tim KKP, sehingga siap untuk segera direalisasikan.

“Kami berharap ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah lengkap, tinggal dukungan percepatan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kelurahan Lasiana tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan kurang lebih 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas nelayan belum maksimal.

Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan pesisir bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Membangun pesisir berarti membangun masa depan. Nelayan

harus menjadi prioritas karena laut adalah sumber kehidupan masyarakat kita,” tegasnya.

Pemkot Kupang, lanjutnya, siap mendukung penuh melalui penyediaan lahan, regulasi pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan bagi nelayan agar program tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat kesiapan lahan telah dipastikan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dan berdaya saing.

“Targetnya bukan hanya membangun kawasan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di NTT, dan pada 2026 koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program.

Selain itu, KKP turut mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

Budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus pengembangan guna meningkatkan ekspor serta memperkuat neraca perdagangan daerah.

Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi dukungan

pemerintah pusat. Ia menilai program-program kelautan dan perikanan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memberi kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di NTT. *

Respon Cepat Aspirasi Warga, DPRD dan Perumda Air Minum Kota Kupang Siap Realisasikan Jaringan Air di Gang Likurai

Kupang, nwartapedia.com – Harapan warga Jalan Bajawa, Gang Likurai RT 39/RW 12 untuk mendapatkan akses air bersih mulai menemukan titik terang. Aspirasi yang disampaikan saat masa reses Anggota DPRD Kota Kupang, Maria Rosalinda Uta Teku, langsung ditindaklanjuti melalui sosialisasi bersama Perumda Air Minum Kota Kupang, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, bersama tim teknis dari bagian perencanaan dan pengawasan.

Koordinator warga setempat, Mery Kleden, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung anggota DPRD serta jajaran Perumda.

“Kami bersyukur karena saat reses, keluhan kami soal belum adanya air langsung ditanggapi. Hari ini Ibu Linda menghadirkan langsung pihak Perumda untuk melihat kondisi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang Maria Rosalinda Uta

Teku yang akrab disapa Linda Uta menjelaskan, persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya dari masyarakat.

Menurutnya, wilayah Gang Likurai sebenarnya sudah memiliki jalur jaringan, sehingga perlu percepatan tindak lanjut teknis agar warga segera terlayani.

“Begitu menerima laporan warga, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Dirut. Karena di sini sudah ada jalur, maka kita minta tim teknis segera turun. Ini kebutuhan dasar, jadi harus cepat ditangani,” tegasnya.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, mengapresiasi peran aktif DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan pihaknya siap merespons jika jaringan memungkinkan untuk dilakukan pemasangan baru.

“Kalau jaringan sudah tersedia, kita dorong agar segera dipasang. Setelah pertemuan ini, petugas lapangan akan menindaklanjuti dan menjawab kebutuhan teknis bapak mama semua,” katanya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ronald Ballo, menjelaskan tahapan yang akan dilakukan.

Pihaknya akan mendata warga yang berminat, melakukan survei lokasi, menghitung jarak pemasangan, serta menentukan model jaringan agar efisien secara teknis dan biaya.

“Kami akan kembali dalam satu sampai dua hari ke depan untuk ambil nama-nama warga dan lakukan pengukuran. Kalau ada pipa yang melewati rumah warga, kita harapkan ada toleransi bersama supaya biaya bisa ditekan,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa distribusi air di Jalan Bajawa dibagi dua zona bagian atas dan bawah dengan sistem

pengaliran bergiliran setiap hari mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 20.00–21.00 WITA, kecuali terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik.

Mewakili warga, Welem Gery menegaskan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses administrasi maupun teknis.

“Pada prinsipnya kami siap. Tinggal waktu pelaksanaan saja. Harapan kami, semakin cepat semakin baik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara DPRD dan Perumda Air Minum Kota Kupang, warga Gang Likurai kini optimistis kebutuhan air bersih yang selama ini dinantikan segera terealisasi. (MI)

Wali Kota Kupang Apresiasi Bantuan Riset Undana Rp1 Miliar, Dorong Kebijakan Berbasis Kajian Ilmiah

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas penyerahan bantuan riset berdampak senilai Rp1 miliar serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama mitra Pemerintah Kota Kupang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh warga Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih berlipat kepada Undana dan Bapak Rektor. Kami memberikan apresiasi yang

tinggi karena telah diberikan kajian-kajian penelitian yang nilainya Rp1 miliar. Ini sangat bagus,” ujar dr. Christian Widodo usai kegiatan.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan kajian ilmiah agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan secara top down. Kalau masyarakat butuh apel, jangan kita kasih jeruk. Supaya tepat sasaran, kita harus tahu apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Karena itu kita butuh kajian dan penelitian,” tegasnya.

Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Semoga penelitian ini tidak berhenti di rak perpustakaan atau di atas meja saja, tetapi harus menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Wali Kota juga membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan Undana. Ia menyebut, jika pemerintah membutuhkan kajian di dinas tertentu, maka dapat langsung diajukan sesuai kebutuhan program prioritas.

“Nanti kalau ada kebutuhan penelitian di dinas tertentu, tinggal kita komunikasikan. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa membuat kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefry S. Balek, ST., M.Eng., menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi.

“Apa yang disampaikan Pak Wali itu memang sudah menjadi kewajiban kami untuk mendukung pemerintahan, baik di lingkup

provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh komitmen yang dibangun hari ini akan kami tindak lanjuti dengan komunikasi intens bersama Pemerintah Kota Kupang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undana akan berkoordinasi untuk menentukan aspek-aspek prioritas yang akan dikerjakan pada tahun berjalan sebagai bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

Menurutnya, model kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan penganggaran dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif.

“Kita langsung belanja masalah kepada pemerintah. Apa yang menjadi kebutuhan, itu yang kita kaji. Undana memiliki mekanisme penelitian dan pengabdian yang bisa memfasilitasi model simbiosis dan kerja sama seperti ini,” jelasnya.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Undana ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis data dan riset demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. (MI)

Anggota DPRD NTT Filmon Loasana dan Bapil PSI NTT Salurkan Bantuan untuk Dua Anak Yatim Piatu di Kupang

Kupang, nwartapedia.com – Di tengah suasana sore yang teduh, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Anggota

DPRD Provinsi NTT dari PSI, Filmon Loasana, bersama Ketua Bapilu DPW PSI NTT, Kanis To. Keduanya mengunjungi sebuah rumah sederhana di Tofa yang dihuni dua anak yatim piatu yang hidup sebatang kara.

Dua bersaudara tersebut harus melanjutkan hidup dan pendidikan tanpa kehadiran kedua orang tua yang telah meninggal dunia.

Meski dalam keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah secara mandiri.

Filmon Loasana kepada media ini menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata kepedulian dan dukungan moral agar kedua anak tersebut tetap semangat mengejar pendidikan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan perhatian. Jangan sampai mereka merasa sendiri. Mereka harus tahu bahwa masih ada yang peduli,” ujar Filmon pada Senin (22/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Filmon bersama Kanis To yang mewakili Wali Kota Kupang menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, bolpoin, serta bantuan sembako seperti beras dan bingkisan kasih sebagai bentuk perhatian dan empati.

Menurut Filmon, salah satu dari kedua anak tersebut, yakni sang kakak perempuan, saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa.



Namun demikian, ia menilai tetap dibutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi NTT, agar keberlanjutan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka dapat terjamin.

“Kami berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi. Anak perempuan ini sedang kuliah dan mendapat beasiswa, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara bagi anak-anak yang hidup tanpa orang tua, terutama dalam memastikan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kunjungan tersebut berlangsung penuh haru. Selain menyerahkan bantuan, keduanya juga memberikan motivasi agar kedua anak tersebut tetap kuat dan tidak menyerah pada keadaan.

“Kami berharap perhatian terhadap mereka tidak berhenti di sini. Mereka adalah generasi masa depan NTT yang harus kita jaga bersama,” tutup Filmon. (MI)

Dari Mimbar Ramadan, Dirjen Akmal Malik Serukan Gerakan Pangan Mandiri Berbasis Rumah Ibadah di Kota Kupang

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, menyerukan pentingnya membangun kemandirian pangan berbasis

rumah ibadah dan sekolah saat menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (22/2/2016).

Dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang dan para tokoh agama atas capaian Kota Kupang yang masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk melangkah lebih jauh membangun kemandirian umat.

“Atas nama pemerintah pusat, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan seluruh tokoh agama di Kota Kupang. Kerukunan di kota ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi dan kerukunan harus diperkuat dengan langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang ditawarkan adalah mendorong rumah ibadah menjadi pusat gerakan ketahanan pangan.

Akmal Malik menekankan filosofi sederhana yang ia pelajari sejak kecil.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Sekali lagi, doa terbaik adalah ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga dan masyarakat kita?” tegasnya.

Ia menilai, masih banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipasok dari luar daerah, padahal potensi lahan dan sumber daya manusia tersedia. Karena itu, ia mengajak masjid, gereja, dan sekolah untuk memulai gerakan tanam sederhana seperti cabai, bayam, dan pakcoy yang masa panennya relatif singkat.

“Bayam 22 hari sudah panen, pakcoy 30 hari sudah panen. Ini hal sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama akan

membentuk ekosistem ekonomi umat yang kuat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar rumah ibadah juga menjadi ruang praktik bagi generasi muda untuk belajar bertani, beternak, dan mengelola usaha produktif. Menurutnya, pendidikan tanggung jawab dan kemandirian harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Kalau kita masih terus membeli sayur ke pasar, sementara kita punya lahan dan tenaga, itu menjadi refleksi bagi kita. Tuhan sudah memberikan pikiran dan kekuatan, tinggal bagaimana kita mengelolanya,” katanya.

Akmal Malik juga menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung inisiatif daerah dalam membangun gerakan pangan berbasis komunitas dan rumah ibadah. Ia optimistis, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, Kota Kupang tidak hanya dikenal sebagai kota toleran, tetapi juga kota yang mandiri dan berdaya.

“Kerukunan sudah kita miliki. Sekarang saatnya memperkuatnya dengan kemandirian ekonomi umat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah ibadah,” pungkasnya. (MI)

Kolaborasi Lintas Agama di Kupang: Rumah Ibadah Didorong Jadi Pusat Ketahanan Pangan dan Penguat Toleransi

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya peran rumah ibadah sebagai

pusat pemberdayaan umat dan penggerak ketahanan pangan dalam acara buka puasa bersama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penanaman tanaman produktif di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, jajaran Kemendagri, unsur Forkopimda Kota Kupang, Ketua Pengadilan, perwakilan Kapolresta, Dandim, Kejaksaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, para pimpinan organisasi keagamaan, camat, lurah, serta ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di tengah bulan Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kota Kupang.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ini bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun kota yang inklusif dan berdaya,” ujar dr. Christian Widodo.

Ia menekankan bahwa rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga dapat menjadi pusat penggerak sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

“Kita ingin gereja dan masjid menjadi contoh. Kita tanam bersama, rawat bersama, dan hasilnya untuk umat. Inilah wujud gotong royong dan kolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Drs. Akmal Malik, M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Kalau kita masih bergantung membeli sayur dari luar, padahal lahan ada, tenaga ada, itu

menjadi tantangan bagi kita bersama. Mari mulai dari hal sederhana, tanam cabai, bayam, dan sayuran cepat panen," ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Kota Kupang yang masuk 10 besar kota toleran dan dikenal sebagai kota damai dan inklusif.

Ketua MUI Kota Kupang. H. Muhammad Ms dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan kolaboratif lintas agama yang digagas Pemerintah Kota Kupang.

"Kerukunan di Kota Kupang harus terus dirawat dengan aksi nyata, bukan hanya wacana. Ketika masjid dan gereja bersama-sama menanam dan membangun ketahanan pangan, itu adalah bentuk ukhuwah dan kebersamaan yang sesungguhnya," ujarnya.

Ia menambahkan, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus membangun kemandirian umat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bonipoi Kupang, H. Indra Harun, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Kupang dan jajaran dalam kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Kupang. Momentum buka puasa bersama ini kiranya semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan kita semua," ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penanaman simbolis tanaman produktif sebagai komitmen membangun ketahanan pangan berbasis kolaborasi lintas agama di Kota Kupang. (MI)

Musrenbang Oebobo 2027 Resmi Dibuka, Wali Kota Kupang Tegaskan Pembangunan Berbasis Usulan Warga

Kupang, nwartapedia.com – Wali Koya Kupang, dr. Christian Widodo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Kecamatan Oebobo Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin (23/2/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis mempertemukan aspirasi warga dengan tanggung jawab pemerintah.

“Musrenbang adalah titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kewenangan pemerintah. Dari sinilah kebijakan dan program lahir, sehingga benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Christian Widodo menyoroti inovasi baru Pemkot Kupang berupa pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.

Ia menekankan, yang dialokasikan bukan dana tunai, melainkan paket program pembangunan senilai Rp500 juta yang tetap dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Skema ini memberi kepastian bahwa setiap kelurahan akan

memperoleh program prioritas sesuai usulan masyarakat.

Adapun komposisi alokasi diarahkan sekitar 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen sosial budaya, dan 10 persen untuk penguatan ekonomi.

“Kita ubah pendekatan. Jangan lagi top down. Kalau warga minta jalan, yang dibangun harus jalan. Kalau warga butuh drainase, itu yang diprioritaskan. Kebijakan harus lahir dari bawah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan tahun berjalan, sehingga perencanaan tetap terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Ota, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun tahun ini terdapat terobosan signifikan melalui penerapan pagu indikatif per kelurahan.

“Dengan adanya pagu indikatif, masyarakat tidak lagi pulang tanpa kepastian. Setiap kelurahan memiliki ruang fiskal yang jelas untuk menjawab kebutuhan prioritas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh usulan telah melalui proses asistensi dan disesuaikan dengan daftar program prioritas yang tersedia dalam sistem perencanaan daerah.

Kebijakan tersebut juga akan tetap melalui pembahasan bersama DPRD sebagai bagian dari mekanisme politik anggaran.

Plt. Camat Oebobo, Zet Batmalo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan menyepakati program prioritas hasil Musrenbang kelurahan yang telah diselaraskan dengan pagu indikatif Rp500 juta per kelurahan sebelum dibawa ke tingkat kota.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah fundamental dalam

transformasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan memiliki kepastian arah.

Forum Musrenbang Oebobo 2027 diharapkan menjadi wadah efektif untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing. (MI)

Pemkot Kupang Gelar Musrenbang dan Pra Musrenbang Stunting, Fokus pada Prioritas dan Penguatan SDM

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melaksanakan Musrenbang Kecamatan yang dirangkaikan dengan Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kantor Camat Maulafa.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan agar lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., yang menekankan pentingnya disiplin waktu dan ketepatan prioritas dalam penyusunan program.

Ia mengingatkan agar usulan pembangunan difokuskan pada kebutuhan mendesak dan berdampak langsung, mengingat keterbatasan fiskal daerah.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa prevalensi stunting

Kota Kupang tahun 2025 masih berada di angka 16,8 persen.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian utama selain pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp500 juta untuk setiap kelurahan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Ke depan, skema alokasi akan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan agar distribusi anggaran lebih proporsional.

Pra Musrenbang Tematik Stunting yang digelar tahun ini merupakan yang pertama di Kota Kupang, sesuai arahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Hasilnya akan menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama. ***